

KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BP3D) KABUPATEN BOYOLALI DALAM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Oleh

Kunti Indira Murti

Abstract

The research purpose was analyzed the coordination undertaken by the Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) of Boyolali Regency in preparation of Regional Government Work Plan (RKPD). Research method used descriptive qualitative. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. Data analysis technique used Miles and Huberman inductive models. Validity data testing used triangulation techniques. Based on research results it can be concluded 1) The actions unity have been able to run well; 2) Communication has been going well that was carried out in the form of deliberations, coordination meetings, and Focus Group Discussions; 3) The division of work is very clear and reflects the ability of BP3D Boyolali Regency to work in a structured and planned manner; and 4) Discipline has been going well, this can be seen from the ability to complete the stages of RKPD preparation in accordance with a predetermined time frame.

Keywords: action; communication; division of labor; discipline

Pendahuluan

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah menjadi salah satu keinginan bersama bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan *good governance* pemerintah Indonesia harus menentukan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Indonesia memiliki rentang geografis yang begitu luas, kompleksnya permasalahan yang ada, dan kurangnya sumber daya dan kemampuan pemerintah untuk mewujudkan *good governance*, maka pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa langkah yang diambil adalah langkah yang tepat. Salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia adalah menyelenggarakan perencanaan

pembangunan yang terarah dan terencana sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan tepat sasaran.

Perencanaan pembangunan haruslah tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan validitas keilmuan (*scientific validity*) dan relevansi kebijakannya. Didorong oleh motif ini, perencanaan pembangunan mengalami perkembangan yang cukup dinamis (Sihombing: 2005). Hal ini di selaras dengan pernyataan Sjafrizal (2016) bahwa perencanaan pembangunan yang di dalamnya termasuk unsur perencanaan nasional dan daerah diantaranya bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah tersebut

sehingga proses pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi semakin terpadu, dapat bertumbuh secara cepat dan efisien.

Rencana pembangunan Kabupaten Boyolali dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, dan disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi: 1) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik; 2) pengkoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan daerah dalam bentuk dokumen, antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS; 3) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 5) pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan serta statistik (Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018).

Dalam menjalankan tugasnya untuk menyusun RKPD salah satu

tugas BP3D Kabupaten Boyolali adalah melaksanakan koordinasi. Koordinasi dalam pencapaian tujuan organisasi adalah suatu hal yang sangat diutamakan oleh setiap organisasi, faktor pengawasan yang tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha kerja sama antara sesama pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Agung Iskandar (2013:139) mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (Malayu S.P. Hasibuan. 2014: 85). Koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dianalisis melalui indikator antara lain kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

Tujuan koordinasi yang dilaksanakan BP3D Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikir ke arah tercapainya sasaran perusahaan; 2) Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan; 3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan; 4) Untuk menghindari kekacauan dan

penyimpangan tugas dari sasaran; 5) Untuk meng-integrasikan tindakan ke arah sasaran organisasi perusahaan; dan 6) Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan (Hasibuan, 2014: 80).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Aidinil Zetra dkk (2015) menunjukkan bahwa kebanyakan SKPD telah menyusun renstra dan rencana kerja 1 tahun, akan tetapi banyak ditemukan dokumen renstra dan renja SKPD tersebut masih bersifat formalitas dengan rumusan sasaran, penetapan indikator serta target belum memuaskan. Penyusunan rencana kerja SKPD masih terjebak ke dalam pola lama penyusunan program yaitu mengajukan program sebanyak-banyaknya, dibuat seindah indahnya dan kadang-kadang tidak didasarkan kepada informasi tentang ketersediaan sumberdaya daerah dan arah pembangunan nasional.

Namun demikian keterbatasan tersebut tidak menghalangi tugas koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali sehingga diperlukan suatu upaya penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi yang dilaksanakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna,

maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bermaksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali ketika pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali berlangsung. Menurut Sugiyono (2016: 248) penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya.

Lokasi penelitian pada Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil wawancara dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya.

Hasil Penelitian

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai institusi perencana, penelitian dan pengembangan berfungsi membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di daerah dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana, penelitian dan pengembangan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan, penelitian dan pengembangan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan.

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020 menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2020. Selain itu, RKPD juga akan digunakan sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan RKPD dari sisi proses ditempuh melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dan dilakukan melalui pentahapan yaitu: 1) Persiapan Penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan

Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD.

1. Tahap Persiapan Penyusunan RKPD

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tugas tim penyusun RKPD selanjutnya dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenaan. Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana mencakup hal-hal sebagai berikut: analisis gambaran umum kondisi Daerah;

analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; analisis kapasitas riil keuangan Daerah; penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan terhadap sasaran RPJMD; penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 88 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyusunan Rancangan RKPD kabupaten adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten berdasarkan: rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten yang telah diverifikasi; dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April. BP3D Kabupaten Boyolali mengajukan rancangan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: rancangan RKPD kabupaten/kota; dan pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Pada akhirnya, tujuan akhir integrasi program dan kegiatan prioritas adalah untuk memastikan bahwa pagu indikatif program telah selaras dengan pagu indikatif kegiatan. Dengan kata lain, pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD telah tidak melebihi batas pagu program atau total pagu indikatif kegiatan telah sesuai dengan perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan bagi belanja langsung OPD.

4. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang RKPD kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD Provinsi. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota diselenggarakan paling lama pada minggu terakhir bulan Maret.

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan me-nyepakati langkah-langkah pe-nanganan program kegiatan prioritas yang tercantum

dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan Musrenbang RKPd kabupaten di kecamatan di-koordinasikan oleh BP3D Kabupaten dan dilaksanakan oleh Camat. Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyelenggaraan musrenbang RKPd kabupaten di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Pebruari.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPd

Setelah Musrenbang RKPd kabupaten diselenggarakan, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam Rancangan RKPd menjadi Rancangan Akhir RKPd. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPd provinsi untuk kabupaten guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPd. Dengan demikian, rancangan akhir RKPd kabupaten berdasarkan hasil musrenbang kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil musrenbang nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. Perumusan dalam rancangan akhir RKPd

lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkah-langkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat.

6. Penetapan RKPd

Rancangan Perkada tentang RKPd yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BP3D Kabupaten Boyolali kepada Bupati Boyolali melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Rancangan Perkada disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPd. RKPd kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati setelah RKPd provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. RKPd kabupaten yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten.

Peraturan Bupati tentang RKPd dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten, pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten. Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pembahasan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat

tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Hasibuan (2014: 88) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Penjabaran analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Hasil temuan indikator kesatuan tindakan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Temuan Hasil Penelitian Indikator Kesatuan Tindakan

No	Tahap	Temuan
1	Persiapan	Kesatuan tindakan pada tahap persiapan penyusunan RKPD antara lain pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali. Penanggung jawab kegiatan persiapan adalah Sekretaris Daerah
2	Penyusunan rancangan awal RKPD	Penyusunan rancangan awal RKPD antara lain analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas Riil keuangan daerah, perumusan permasalahan daerah, berbagai macam kegiatan penelaahan terhadap sasaran, arah, kebijakan dan pokok-pokok penyusunan RKPD, dan diakhiri dengan perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Program yang diusulkan disesuaikan dengan program kerja bupati Boyolali.
3	Penyusunan rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD
4	Pelaksanaan Musrenbang	Musrenbang yang dilaksanakan antara lain musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten. Penanggung jawab Musrenbang adalah para kepala di setiap tingkat
5	Penyusunan rancangan akhir RKPD	Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada sekretaris daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala OPD. Rancangan akhir ini kemudian menjadi bahasan

		dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Gubernur
6	Penetapan RKPD	Rancangan akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan kepala daerah

Sumber: Data hasil wawancara diolah

Kesatuan tindakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali memerlukan kepemimpinan handal dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Setda Kabupaten Boyolali selaku Ketua Tim Penyusun RKPD Kabupaten Boyolali. Dengan kewenangan yang dimilikinya mampu mengatur pelaksanaan tahap demi tahap penyusunan RKPD dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sebagai pelaksana penyusunan RKPD, BP3D Kabupaten Boyolali juga sigap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator yang berperan mengkoordinasikan seluruh OPD di Kabupaten Boyolali agar usulan program yang diajukan sesuai dengan visi dan misi Bupati serta selaras dengan program pembangunan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa kesatuan tindakan dalam penyusunan RKPD telah terlaksana dengan baik sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi

untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Boyolali adalah masih adanya ego sektoral antara OPD dengan TAPD dalam pelaksanaan FGD. Kasus yang sering terjadi adalah Kepala OPD mempertahankan usulan kegiatan guna menambah pagu anggaran padahal usulan program atau kegiatan tersebut kurang selaras dengan kebijakan penyusunan RPKD sehingga terjadi perdebatan dan tarik ulur dengan tim TAPD yang diketuai oleh Sekda Kabupaten Boyolali.

2. Komunikasi

Hasil temuan indikator kesatuan komunikasi dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Temuan Hasil Penelitian Indikator Komunikasi

No	Tahap	Temuan
----	-------	--------

1	Persiapan	Kegiatan komunikasi yang dilaksanakan pada tahap persiapan adalah rapat koordinasi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
2	Penyusunan rancangan awal RKPD	Komunikasi pada tahap penyusunan rancangan awal, BP3D Kabupaten Boyolali melaksanakan Rapat Koordinasi dengan TAPD, Rapat Koordinasi dan FGD dengan OPD.
3	Penyusunan rancangan RKPD	Untuk menghasilkan Rancangan RKPD yang sesuai dengan visi dan misi Bupati, BP3D melaksanakan Rapat Koordinasi dan FGD
4	Pelaksanaan Musrenbang	BP3D Kabupaten Boyolali melaksanakan musyawarah, rapat koordinasi dengan OPD serta para pimpinan daerah dari tingkat desa sampai kecamatan
5	Penyusunan rancangan akhir RKPD	Dalam penyusunan rancangan akhir dilakukan komunikasi dengan Bagian Hukum Setda untuk menyusun Raperkada
6	Penetapan RKPD	Kerjasama dan koordinasi tim penyusun RKPD, OPD Se-Kabupaten Boyolali

Sumber: Data hasil wawancara diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa komunikasi yang dilaksanakan BP3D Kabupaten Boyolali dalam penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali dalam bentuk kerjasama, rapat koordinasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pada dasarnya tujuan komunikasi yang dilaksanakan BP3D Kabupaten Boyolali adalah agar program yang disusun OPD se-Kabupaten Boyolali dapat selaras dan sesuai dengan visi dan misi Bupati Boyolali serta penyusunannya dapat terselesaikan dalam rentang waktu (*time schedule*) yang telah ditentukan. Dari uraian tersebut tampak bahwa BP3D Kabupaten Komunikasi dapat menjalankan komunikasi dengan baik sehingga rencana kerja yang disusun dapat terlaksana dengan

baik dan tepat sesuai jadwal yang ditetapkan.

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Komunikasi merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang

disampaikannya kepada orang tersebut (Hasibuan, 2014: 88).

Hasil temuan indikator pembagian kerja dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

3. Pembagian Kerja

Tabel 3 Temuan Hasil Penelitian Indikator Pembagian Kerja

No	Tahap	Temuan
1	Persiapan	BP3D Kabupaten Boyolali membentuk 4 bidang yaitu Bidang 1 sebagai koordinator semua bidang, Bidang 2 bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, Bidang 3 bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang 4 bidang Penelitian dan Pengembangan)
2	Penyusunan rancangan awal RKPD	Semua bidang di BP3D Kabupaten Boyolali harus terlibat secara optimal. Program usulan yang belum sesuai dengan program kerja Bupati dilakukan perbaikan
3	Penyusunan rancangan RKPD	Semua bidang terlibat dalam penyusunan rancangan RKPD sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.
4	Pelaksanaan Musrenbang	Tugas BP3D Boyolali dalam pelaksanaan Musrenbang adalah mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang untuk menghasilkan usulan tingkat kecamatan yang akan dibahas di Musrenbang tingkat Kabupaten
5	Penyusunan rancangan akhir RKPD	Penanggung jawab penyusunan rancangan akhir RKPD adalah Sekretaris Daerah. Evaluasi dilakukan tim fasilitasi RKPD dari Bappeda Propinsi Jawa Tengah.
6	Penetapan RKPD	Bupati menetapkan peraturan bupati tentang RKPD sedangkan peran BP3D setelah penetapan RKPD adalah menyusun rancangan APBD

Sumber: Data hasil wawancara diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembagian kerja di BP3D, Setda, dan Bupati dalam penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali sangat jelas dan mencerminkan kemampuan BP3D Kabupaten Boyolali untuk bekerja secara terstruktur dengan segala keterbatasan SDM. Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali membuat 4 bidang dalam Penyusunan RKPD. Bidang 1 sebagai koordinator semua bidang, Bidang 2 (bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah) mengampu OPD yang mempunyai program dan kegiatan tentang perekonomian

dan Infrastruktur Wilayah), Bidang 3 (bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya) mengampu OPD yang mempunyai program dan kegiatan tentang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang 4 (Penelitian dan Pengembangan) mengampu OPD yang mempunyai program dan kegiatan tentang penelitian, kajian dan mempunyai inovasi terhadap kemajuan Kabupaten Boyolali. Sementara itu Setda dan Bagian Hukum Setda

Kabupaten Boyolali mempersiapkan perangkat hukum yang diperlukan untuk membuat rancangan akhir RKPD menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Sedangkan Bupati bertugas mengesahkan RKPD untuk kemudian dijadikan dasar pijakan untuk penyusunan RAPBD.

4. Disiplin

Hasil temuan indikator disiplin dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 Temuan Hasil Penelitian Indikator Disiplin

No	Tahap	Temuan
1	Persiapan	Masing-masing bagian di BP3D Kabupaten Boyolali sudah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik
2	Penyusunan rancangan awal RKPD	Penyusunan rancangan awal RKPD ini bisa dilakukan sesuai <i>time schedule</i> karena jika tidak sesuai jadwal maka penyusunan RKPD akan terganggu.
3	Penyusunan rancangan RKPD	Program yang tidak sesuai visi dan misi Bupati harus dihilangkan
4	Pelaksanaan Musrenbang	Semua <i>stakeholder</i> bisa melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing karena ditunjang dengan adanya sanksi dan hukuman yang tegas bagi daerah yang tidak melaksanakan Musrenbang tepat waktu
5	Penyusunan rancangan akhir RKPD	BP3D Kabupaten Boyolali memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk menjalankann tugasnya dalam penyusunan RKPD
6	Penetapan RKPD	Kendala yang menghalangi penyusunan RKPD adalah terbatasnya SDM yang ada BP3D Kabupaten Boyolali, usulan dari OPD yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan visi dan misi bupati.

Sumber: Data hasil wawancara diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali telah

menunjukkan tingkat disiplin yang baik. Penerapan kedisiplinan ini tampak dari penerapan kerangka waktu yang

ketat, pemberian sanksi yang jelas, serta kemampuan untuk menyelesaikan rintasan yang dihadapi selama proses penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali. Dengan adanya kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya, maka setiap tahapan penyusunan RKPD dapat diselesaikan sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk mencapai disiplin yang tinggi BP3D Kabupaten Boyolali memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk menjalankan tugasnya dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan dalam koordinasi yang dilakukan BP3D Kabupaten Boyolali dalam penyusunan RKPD setelah berjalan dengan baik dan sesuai target yang sudah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan RKPD di BP3D Kabupaten Boyolali adalah rapat koordinasi yang masih belum tepat waktu sehingga situasi tidak berjalan dengan kondusif dan waktu rapat koordinasi menjadi terlalu lama.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai analisis koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesatuan tindakan BP3D Kabupaten Boyolali dalam penyusunan RKPD sudah dapat berjalan dengan baik yang

diwujudkan dengan adanya pengaturan tugas yang harus dilaksanakan pada setiap tahap penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali.

2. Komunikasi BP3D Kabupaten Boyolali dalam penyusunan RKPD telah berjalan cukup baik yang dilaksanakan dalam bentuk musyawarah, rapat koordinasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).
3. Pembagian kerja BP3D Kabupaten Boyolali dalam penyusunan RKPD sangat jelas dan mencerminkan kemampuan BP3D Kabupaten Boyolali untuk bekerja secara terstruktur dan terencana dengan membentuk 4 (empat) bidang dalam Penyusunan RKPD.
4. Disiplin BP3D Kabupaten Boyolali dalam penyusunan RKPD telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat kemampuan menyelesaikan tahap-tahap penyusunan RKPD sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Koordinasi BP3D Kabupaten Boyolali dalam penyusunan RKPD sudah sesuai tujuan yang diharapkan harus selalu dipertahankan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, tingkat koordinasi dengan *stakeholder* dalam penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali harus senantiasa ditingkatkan. Oleh karena itu sebagai sumbangsih penulis terkait dengan Koordinasi BP3D Kabupaten Boyolali dalam penyusunan RKPD berikut disampaikan beberapa saran bahwa untuk meningkatkan proses komunikasi dengan *stakeholder*, BP3D Kabupaten Boyolali perlu

meningkatkan proses kesatuan tindakan dan komunikasi yang baik dengan para *stakeholder*, BP3D Kabupaten Boyolali dengan OPD perlu koordinasi dahulu sebelum FGD dengan Sekda selaku Ketua TAPD berlangsung. Kemudian, meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan rapat koordinasi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara kondusif dan tidak terlalu lama. Selain itu, mensosialisasikan visi dan misi Bupati kepada para *stakeholder* penyusunan RKPD, sehingga dalam membuat program kerja yang akan dimasukkan dalam RKPD dapat sesuai dengan visi dan misi Bupati.

Daftar Pustaka

- Agung Iskandar, Yufriawati. 2013. *Pengembangan Pola Kerja Harmonis Dan Sinergis, Antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*. Jakarta: PT. Bestari Buana Murni. Edisi Pertama
- Aidinil Zetra, Bakaruddin Rosyidi, dan Ferra Yanuar. 2015. *Laporan Riset Voluntarisme Politik Masyarakat Kota Payakumbuh 2015*. KPU Kota Payakumbuh
- Ernan Rustiadi dkk. 2011. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Cretpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Edisi Revisi. ISBN 979-526-491-5
- Sihombing, M. 2005. Pengembangan Wilayah Melalui Paradigma Perencanaan Partisipatif. Wahana Hijau. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sjafrizal, 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta